

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KELINGI
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN**

M FADEL PRATAMA
NPP. 29. 0408

*Asdaf Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email:
fadelpratama92@gmail.com

ABSTRACT

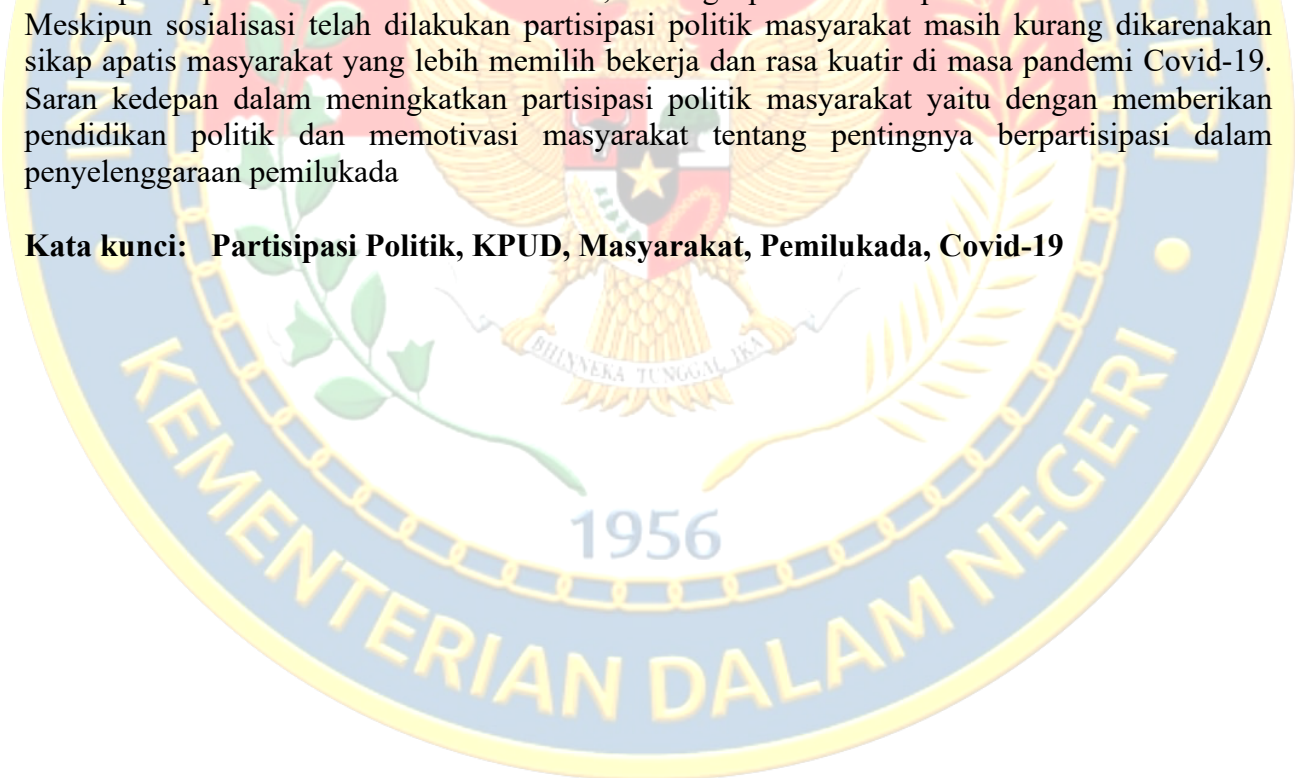
Problem Statement/Background (GAP): (Contains the background behind the research). The low political participation of the people of Muara Kelingi District in the Regional General Elections (KPUD) of Musi Rawas Regency **Purpose** This study aims to determine the level of political participation of the people of Muara Kelingi District and the efforts of the Regional General Election Commission (KPUD) of Musi Rawas Regency in increasing political participation of the people of Muara Kelingi District. **Method:** This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation **Result** the level of political participation of the people of Muara Kelingi District in the election of the Regent and Deputy Regent of Musi Rawas Regency, namely by using the Ramlan Surbakti theory in the form of factors that influence community political participation, namely social status, economic status, political awareness and trust in the government. Community participation in the implementation of the 2020 Musi Rawas Regency General Election of course has its own reasons, starting from the political awareness of the people who think that the post-conflict local election has no effect on their lives and the public's sense of distrust of election candidates or the government. **Conclusion:** The efforts of the Musi Rawas Regency KPUD in increasing the political participation of the people of Muara Kelingi District in the 2020 simultaneous regional elections during the Covid-19 pandemic. The efforts made by the Musi Rawas Regency KPUD have been good, starting from implementing the Covid-19 health protocol, completeness of infrastructure and socialization. Although socialization has been carried out, public political participation is still lacking due to the apathy of the people who prefer to work and worry during the Covid-19 pandemic. Suggestions for the future in increasing community political participation are by providing political education and motivating the community about the importance of participating in the implementation of the post-conflict local election

Keywords: *Political Participation, KPUD, Community, Regional Head Election, Covid-19*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). rendahnya partisipasi politik masyarakat Kecamatan Muara Kelingi dalam Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Musi Rawas **Tujuan:** untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Muara Kelingi dan upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Muara Kelingi.. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif kemudian teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. **Hasil/Temuan:** tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Muara Kelingi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas yaitu dengan menggunakan teori Ramlan Surbakti berupa faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat yaitu status sosial, status ekonomi, kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 tentunya memiliki alasan masing-masing, mulai dari kesadaran politik masyarakat yang beranggapan bahwa pemilu tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka dan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada kandidat pemilihan ataupun pemerintah. **Kesimpulan:** upaya KPUD Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Muara Kelingi dalam pemilu serentak Tahun 2020 dimasa pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan KPUD Kabupaten Musi Rawas sudah baik mulai dari menerapkan protokol kesehatan Covid-19, kelengkapan sarana prasarana dan sosialisasi. Meskipun sosialisasi telah dilakukan partisipasi politik masyarakat masih kurang dikarenakan sikap apatis masyarakat yang lebih memilih bekerja dan rasa khawatir di masa pandemi Covid-19. Saran kedepan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu dengan memberikan pendidikan politik dan memotivasi masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Kata kunci: Partisipasi Politik, KPUD, Masyarakat, Pemilu, Covid-19



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi secara sederhana didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilihan umum ataupun pemilihan Kepala Daerah merupakan media pelaksana kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Sejak berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disingkat PEMILUKADA.

Salah satu penyelenggara kegiatan politik seperti pemilihan umum ataupun Pemilukada di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokrasi di daerah. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijadikan dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pemerintah pusat menjadikan Pemilihan Kepala Daerah selaku instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. Masyarakat kebingungan kapan akan dilaksanakannya Pemilukada. Sosialisasi terbuka tentang Pemilukada yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan secara terbatas karena Pemilukada dilaksanakan pada masa pandemi virus CORONA 19 dan harus sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian banyaknya masyarakat yang merantau sehingga saat pada saat pemilihan berlangsung mereka tidak menggunakan hak suara.

hal tersebut membuat penulis tertarik meneliti fenomena terkait partisipasi masyarakat di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas karena rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam rangka menyusun skripsi penulis akan melakukan penelitian tentang **“PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KELINGI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN”**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Rendahnya partisipasi politik masyarakat Kecamatan Muara Kelingi yang dikemukakan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Muara Kelingi beliau mengatakan permasalahan tersebut dikarenakan Pemilukada dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19, perubahan jadwal dan tahapan Pemilukada dari awalnya dilaksanakan 23 September 2020 kemudian dilaksanakan pada 9 Desember 2020 hal tersebut membuat masyarakat kebingungan kapan akan dilaksanakannya Pemilukada. Sosialisasi terbuka tentang Pemilukada yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan secara terbatas karena Pemilukada dilaksanakan pada masa pandemi virus CORONA19 dan harus sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian banyaknya masyarakat yang merantau sehingga saat pada saat pemilihan berlangsung mereka tidak menggunakan hak suara

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Atiek Lestari pada tahun 2008 yang berasal dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul skripsi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Studi Tentang Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kalangan Masyarakat Kabupaten Purworejo). Penelitian ini menggunakan menggunakan metode *mixed methods* (penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif). Kesimpulan dari penelitian ini yakni tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Purworejo masih rendah, sebagian besar tergolong pemilih rasional karena masih memilih berdasarkan pertimbangan tertentu dan angka golput masih tergolong tinggi. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian, kasus pemilihan dan lokasi pemilihan.

Kedua, Fritz Yoel Lewis Lubis yang dilakukan pada tahun 2020 berasal dari Universitas Sumatera Utara, dengan judul skripsi Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Medan Tahun 2020 di Kecamatan Medan Selayang . Konsep pemilihan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif berupa wawancara sebagai data primer dan buku, jurnal, artikel, undang-undang sebagai data sekunder. Penelitian tersebut dapat disimpulkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020 di Kecamatan Medan Selayang masih rendah. Target partisipasi pemilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan pada Pilkada Kota Medan tidak

sesuai target secara nasional. Berdasarkan data pada penelitian ini partisipasi masyarakat Kecamatan Medan Selayang berada dibawah 50%.

Ketiga, Mashuri Akbar pada tahun 2018 yang berasal dari Universitas Sumatera Utara, dengan judul skripsi Efektivitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Batubara dinilai cukup efektif karena dilihat dari partisipasi masyarakat di Kabupaten Batubara meningkat hal itu didasarkan pada indikator efektivitas, pencapaian tujuan, integrasi, serta adaptasi KPU Kabupaten Batubara.

Keempat, Muslimin pada tahun 2019 berasal dari Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul skripsi Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Kolom Kosong Dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Enkreang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enkreang terlihat bebas memilih sesuai keinginan mereka tanpa dipengaruhi orang lain dan upaya tim pemenangan kolom kosong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membuat isu seperti kegagalan dari bupati petahana. Tim pemenangan kolom kosong juga melakukan strategi *Lobby*, pengumpulan massa dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan masyarakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu lokasi penelitian dan kasus penelitian.

Kelima, Muhammad Fadhlul Abrar pada tahun 2019 berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kasus Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, dan Kecamatan Bangkinang). Penelitian ini metode menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sudah cukup berperan dalam pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat masih dinilai apatis dan rendahnya minat masyarakat dalam pemilihan itu disebabkan oleh rasa ketidakpercayaan baik itu kepada kandidat calon ataupun kepada KPU itu sendiri. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada lokasi penelitian, kasus penelitian dan teori yang digunakan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Mendeskripsikan faktor–faktor yang menyebabkan partisipasi politik Masyarakat kecamatan Muara Kelingi belum optimal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.
2. Mendeskripsikan upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Musi Rawas meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.

II. METODE

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sebab peneliti fokus dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, objektif dan benar-benar terjadi, agar dapat dipahami setiap fakta yang terjadi guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi.

Menurut sugiyono (2014:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari setingnya, data dapat dikumpulkan pada seting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, disekolah dengan tenaga pendidik dan kependidikan, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain”. Berdasarkan data tersebut, tentunya data yang diperoleh haruslah sesuai dengan fakta sehingga dapat menjadi referensi yang akan menimbulkan beberapa klasifikasi data.

Sugiyono (2014:62) mengemukakan bahwa, “setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen”. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang

diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Partisipasi Politik Masyarakat

Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 Kabupaten Musi Rawas ikut serta dalam penyelenggaraan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dimana peneliti menggunakan teori partisipasi politik untuk menilai pelaksanaan partisipasi politik Masyarakat Kecamatan Muara Kelingi. Menurut Ramlan Surbakti tinggi rendahnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi oleh faktor – faktor antara lain: Status sosial, Status ekonomi, Kesadaran politi, dan Kepercayaan terhadap pemerintah.

1. Status Sosial

Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat karena keturunan, pendidikan, pekerjaan. Status sosial sangat memengaruhi pola pikir dan pandangan masyarakat, dengan latar belakang yang berbeda maka akan terbentuk pola kehidupan yang berbeda. Sesuai dengan teori yang diungkapkan Ramlan Surbakti bahwa “Status sosial merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi, merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, tingkat pendidikan dan pekerjaan”. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut.

Kedudukan atau status sosial masyarakat dapat memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Seseorang yang memiliki pekerjaan seperti guru memiliki kecenderungan lebih sadar akan pentingnya perkembangan politik walaupun pemilukada ini berlangsung pada musim pandemi covid-19 mereka tetap menerapkan protokol kesehatan agar mencegah penyebaran klaster baru. Berbeda dengan masyarakat yang pekerjaannya sebagai seorang petani yang takut berkrumun pada musim pandemi covid-19. Masyarakat yang status sosialnya rendah beranggapan apabila berkrumun bisa menyebabkan klaster baru covid-19 dan adanya anggapan bahwa kegiatan pemilihan kepala daerah tidak akan mengubah pekerjaan ataupun status sosial mereka. Selain itu lingkungan keluarga yang kurang mendukung untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

A. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan lapisan masyarakat berdasarkan pada lapisan masyarakat yang didasari pendidikan yang telah ditempuh. Tingkat pendidikan dapat memengaruhi pola pikir dalam menghadapi suatu permasalahan. Tingkat pendidikan juga memengaruhi tindakan yang akan dilakukan, seseorang yang pendidikannya lebih tinggi akan mendahulukan rasionalitas dan relevansi dengan ilmu pengetahuan.

Kecamatan Muara Kelingi tingkat pendidikan masyarakatnya termasuk dalam golongan terpelajar. Hal tersebut didasari dengan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Muara Kelingi yang cukup lengkap dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas, dengan keadaan tersebut seharusnya membuat masyarakat memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah. Partisipasi politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang tinggi dengan mempertimbangkan partisipasinya dengan menggunakan rasionalitas. Namun dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan fasilitas yang lengkap tidak menjamin tingkat partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah. Banyak masyarakat yang lebih memilih pekerjaannya ataupun berlibur dibandingkan ke TPS untuk mencoblos, hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak puas dengan kinerja Petahana sehingga memengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.

B. Pekerjaan

Kecamatan Muara Kelingi salah satu wilayah perkebunan terluas di Kabupaten Musi Rawas, sehingga banyak masyarakat bekerja sebagai petan ataupun buruh tani. Pekerjaan pada sektor perkebunan ini mendominasi masyarakat di wilayah Kecamatan Muara Kelingi. Pekerjaan ini berlangsung tiap hari dan menjadi ketergantungan bagi setiap masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kegiatan pertama yang dilakukan adalah pendataan dan pencatatan daftar pemilih tetap karena hal tersebut sangat penting dan harus dilakukan dengan semaksimal mungkin sehingga dapat mengurangi masalah dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap. Namun dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap bukan tanpa ada masalah,

Masyarakat pada umumnya sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut didasari dengan adanya sebagian masyarakat aktif untuk mencatatkan dirinya untuk diikutsertakan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Sebagian masyarakat sudah mendatangi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk mendaftarkan dirinya tanpa harus didatangi oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan telah mendatangi satu per satu masyarakat di Kecamatan Muara untuk mendata tetapi mengalami kendala karena masyarakat sedang tidak ada dirumah. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang bekerja kemudian ada juga masyarakat yang merantau sehingga pada saat pencoblosan berlangsung banyak masyarakat tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

2. Kesadaran Politik

Kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara menyangkut pengetahuan tentang lingkungan masyarakat, politik serta minat perhatian seseorang terhadap politik dan masyarakat disekitar tempat tinggalnya. masyarakat Kecamatan Muara Kelingi tidak memilih berdasarkan kesamaan kepentingan ataupun ideologi karena masyarakat sekarang melihat bentuk nyata dari pembangunan yang ada di Kecamatan Muara Kelingi, dimana pembangunan yang tidak merata dan banyak infrastruktur yang tidak kunjung diperbaiki, karena hal tersebutlah masyarakat tidak percaya terhadap kesamaan ataupun ideologi.

Kesamaan kepentingan ataupun ideologi tidak membuat masyarakat Kecamatan Muara Kelingi memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pemilu pada tahun 2020. Hal tersebut sejalan apa yang terjadi dilapangan dimana pada saat peneliti melakukan observasi di daerah Kecamatan Muara Kelingi masih banyak jalan yang berlobang dan salah satu jembatan yang menghubungkan antar desa yang ada di Kecamatan Muara Kelingi terjadi kerusakan dan belum diperbaiki, sehingga hal tersebut memperlambat mobilisasi masyarakat juga menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat Kecamatan Muara Kelingi. Hal ini terlihat jelas bahwa masyarakat Kecamatan Muara Kelingi beranggapan bahwa siapapun bupati yang terpilih tidak akan membangun infrastruktur yang ada di Kecamatan Muara Kelingi, mengubah pekerjaan ataupun memperbaiki perekonomian masyarakat. Hal ini yang membuat masyarakat lebih memilih untuk bekerja ataupun masyarakat yang sedang merantau tidak berpartisipasi pada hari pencoblosan berlangsung.

3. Status Ekonomi

Status ekonomi bisa dikatakan kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda dimana seseorang tersebut melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan mereka sehari – hari agar mendapatkan kehidupan yang layak. Seseorang akan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga berada pada lapisan masyarakat yang diharapkan. Kecamatan Muara

Kelingi memiliki 20 Desa dan 1 Kelurahan dimana wilayah Kecamatan Muara Kelingi adalah wilayah perkebunan sawit dan karet sehingga rata-rata pekerjaan masyarakat adalah sebagai petani. Lahan perkebunan sawit disini kebanyakan lahan milik perusahaan, sehingga masyarakat yang bekerja diperusahaan dituntut untuk bekerja dan memenuhi target yang ditetapkan oleh perusahaan, hal tersebutlah yang membuat masyarakat tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka dikarenakan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan tuntutan dari perusahaan.

Banyak masyarakat sangat bergantung kehidupannya pada sektor ekonomi. Dimana setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda maka dari itu terdapat terdapat masyarakat yang lapisannya rendah berusaha untuk memenuhi kebutuhan primernya saja, berbeda dengan masyarakat yang tingkat ekonomi yang tinggi dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Ada juga masyarakat yang merantau untuk memenuhi kebutuhan mereka ataupun meningkatkan ekonominya menjadi lebih baik. Permasalahan yang muncul adalah ketika mereka harus ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan harus meninggalkan pekerjaannya. Hal tersebut menjadi dilema bagi masyarakat yang ekonominya rendah ataupun yang sedang merantau, mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari atau mereka tidak bekerja dan memilih untuk mencoblos maka mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

4. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah itu menyangkut tentang penilaian seseorang terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah apakah dapat dipercaya dan dapat merealisasikan aspirasi mereka. Fenomena politik uang tidak dapat dihindarkan dari setiap adanya pesta demokrasi demi menarik perhatian masyarakat untuk memilih calon agar dapat menjadi pemimpin di suatu daerah. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat yang bekerja sebagai petani kebanyakan tingkat pendidikan dan ekonomi mereka rendah, sehingga membuat masyarakat tidak memiliki arah untuk memilih salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga membuat mereka tergiur untuk memilih salah satu calon demi mendapatkan uang.

Politik uang tidak menjamin masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah bahkan membuat masyarakat lebih tidak percaya terhadap pemerintah. Hal ini berdampak buruk bagi pesta demokrasi kita yang membuat masyarakat tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan lebih memilih untuk bekerja pada saat pencoblosan berlangsung, ini salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tentu hal tersebut perlunya

sosialisasi dilakukan oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas lebih efektif dan membenahan sistem Pemilu yang ada di Kabupaten Musi Rawas sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah selanjutnya.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Atiek Lestari pada tahun 2008 yang berasal dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul skripsi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Studi Tentang Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kalangan Masyarakat Kabupaten Purworejo). Adapun persamaan adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yakni Metode penelitian sama metode pendekatan deskriptif kualitatif. .adapun perbedaannya yakni Teknik pengumpulan data pada penelitian nya. Dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Selain itu, lokus yang dipilih juga berbeda.Fritz Yoel Lewis Lubis yang dilakukan pada tahun 2020 berasal dari Universitas Sumatera Utara, dengan judul skripsi Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Medan Tahun 2020 di Kecamatan Medan Selayang. Adapun persamaan adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yakni Metode penelitian sama metode pendekatan deskriptif kualitatif. .adapun perbedaannya yakni Teknik pengumpulan data pada penelitian nya. Dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Selain itu, lokus yang dipilih juga berbeda.

Mashuri Akbar pada tahun 2018 yang berasal dari Universitas Sumatera Utara, dengan judul skripsi Efektivitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Adapun persamaan adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yakni Metode penelitian sama metode pendekatan deskriptif kualitatif. .adapun perbedaannya yakni Teknik pengumpulan data pada penelitian nya. Dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Selain itu, lokus yang dipilih juga berbeda.Muslimin pada tahun 2019 berasal dari Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul skripsi Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Kolom Kosong Dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Enkreang). Adapun persamaan adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yakni Metode penelitian sama metode pendekatan deskriptif kualitatif. .adapun perbedaannya yakni Teknik pengumpulan data pada penelitian nya. Dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Selain itu, lokus yang dipilih juga berbeda.

Muhammad Fadhlul Abrar pada tahun 2019 berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kasus Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, dan Kecamatan Bangkinang). Adapun persamaan adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yakni Metode penelitian sama metode pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya yakni Teknik pengumpulan data pada penelitiannya. Dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Selain itu, lokus yang dipilih juga berbeda.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Muara Kelingi dan upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Musi Rawas untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Muara Kelingi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020. Partisipasi masyarakat Kecamatan Muara Kelingi berada pada posisi keempat terendah dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas dengan 30.457 Daftar Pemilih Tetap, 22.658 pengguna hak suara, dan 7.799 tidak menggunakan hak suara dengan persentase 25,60%. Rendahnya partisipasi politik masyarakat karena banyaknya masyarakat bekerja pada saat pencoblosan berlangsung dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilu pada ini untuk 5 tahun kedepan. Sehingga dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Muara Kelingi belum optimal dikarenakan status Sosial memengaruhi tingkat pendidikan dan pekerjaan.

Upaya KPUD Kabupaten Musi Rawas dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Muara Kelingi telah dilakukan dengan baik dimana setiap staf KPUD Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan tupoksinya masing-masing. Selain itu semua pihak panitia penyelenggaraan Pemilu pada ini seperti KPUD Kabupaten Musi Rawas, PPK Muara Kelingi, PPS dan PPDP telah menjalankan tupoksinya masing-masing dengan baik sehingga pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 berjalan dengan aman dan tentram sehingga tidak terjadi keributan. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan pada masa pandemi Covid-19 dan seluruh panitia penyelenggaraan Pemilu pada ini telah melakukan penegakan protokol kesehatan

dengan tidak terjadi penumpukan pada saat pencoblosan dan hal tersebut berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi claster baru Covid-19.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Wheelen dan Hunger saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Muara Kelingi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Camat Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Atiek Lestari. (2008) *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Faudy, Munir. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Faulks, Keith. (2015) *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*. Nusamedia.
- Fritz Yoel Lewis Lubis. (2020). *Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Medan Tahun 2020 di Kecamatan Medan Selayang*.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Liddle, R. William. (1992). *Pemilu-Pemilu Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Maran, Rafael. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mashuri Akbar. (2018). *Efektivitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Husaini.
- McClosky, Herbert. (1972). “*partisipasi politik*,” *International Ensiklopedia Ilmu Sosial Edisi ke-2*. New York: MacMilan Company.